



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	11
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	14
E. Peta Proses Bisnis	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. Tujuan dan Sasaran	20
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	21
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Keuangan	29
BAB IV : PENUTUP	38

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur serta berkat rahkmat Allah SWT, akhirnya penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah* (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2019 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan tolok ukur pencapaian kinerja instansi Dinas Pendidikan yang dilaksanakan selama tahun 2019.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi krisis multidimensi mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketiga aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2019 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019.

Penyajian LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2019 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Kami jajaran Dinas Pendidikan menyadari sepenuhnya, bahwa LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2019 masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak agar dapat kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya. Semoga niat dan dukungan yang mulia ini mendapatkan ridho Allah SWT.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan LKjIP Tahun 2019, Akhirnya, semoga buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman oleh semua pihak yang berkepentingan.

Sampang, Februari 2020

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
NIP. 19681231 198703 1 008

BAB I PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan diatur Berdasarkan Perbub Sampang Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Struktur organisasi ini disusun dengan tujuan agar organisasi yang ada dalam struktur itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai 5 (Lima) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

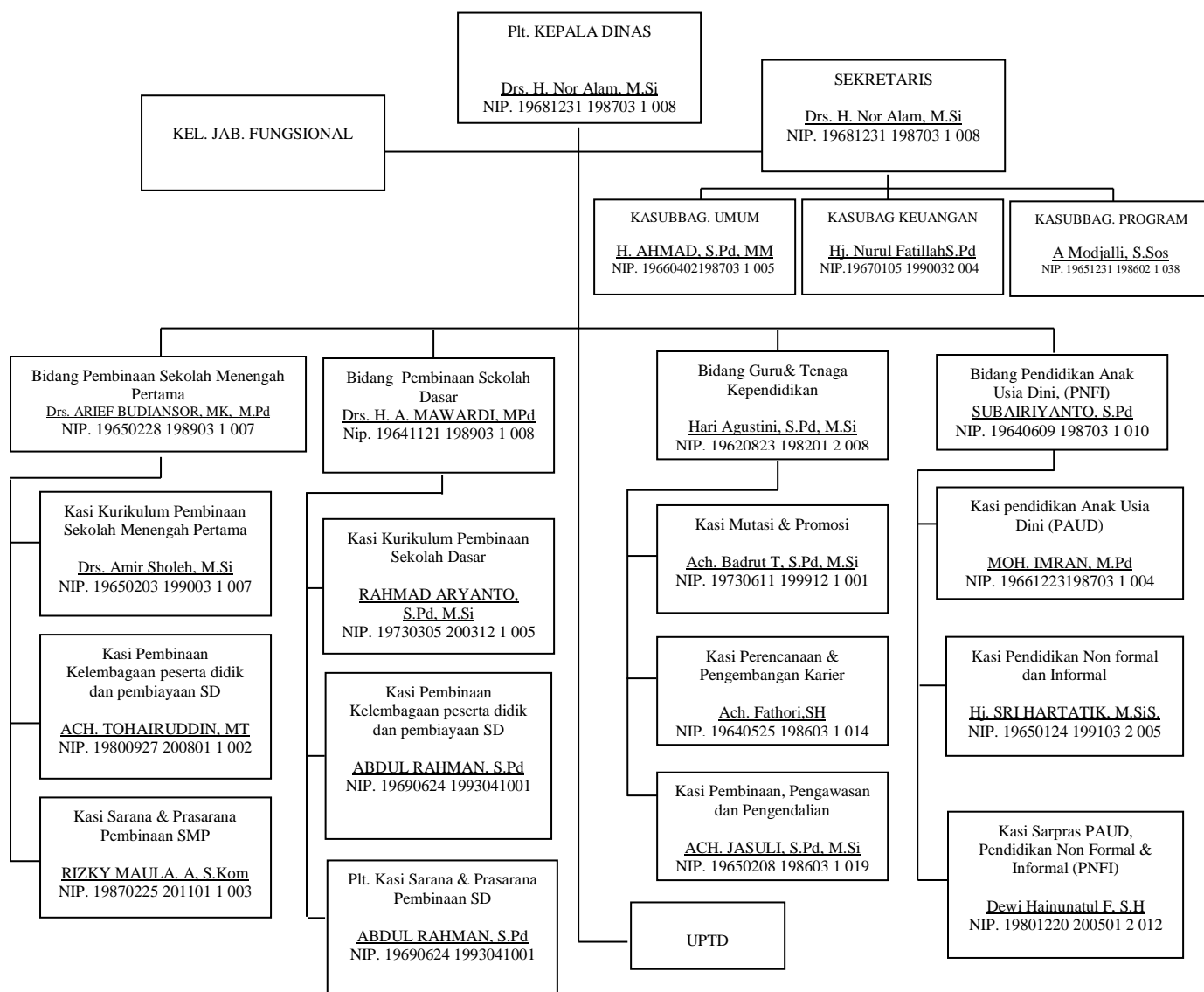
Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal

3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Dasar
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Dasar
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 1. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
 1. Seksi Mutasi dan Promosi
 2. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier
 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
- g. UPT Dinas dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana pada bagan struktur berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG SESUAI PERBUP SAMPANG
NOMOR 75 TAHUN 2016**



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi di atas dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol. Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta bertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

- 1) *Sub Bagian Umum*
 - 2) *Sub Bagian Keuangan*
 - 3) *Sub Bagian Program*
2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan, pelaksanaan dan pembinaan serta fasilitasi penerapan standar teknis bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal. Adapun fungsi dari bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal adalah:
- a. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran seluruh Seksi pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - b. Penyelenggaraan/penerapan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - c. Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - d. Penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - e. Penetapan bahan ajar yang relevan pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - f. Penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan pendidik, siswa dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - g. Penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - h. Pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pendidik, siswa dan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - i. Penetapan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;

- j. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan soal-soal ujian dan penilaian hasil belajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- k. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- l. Pelaksanaan fasilitasi akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas;
- m. Pemberian ijin operasional, rekomendasi pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- n. Pelaksanaan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- o. Pengkoordinasian dan persiapan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- p. Pelaksanaan usulan pembangunan sekolah, rehabilitasi gedung sekolah, dan pembangunan kantor serta bangunan fasilitas penunjang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal membawahi:

- 1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2) Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal
3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Bidang tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan kurikulum Sekolah Dasar
- c. Pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- d. Pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Dasar;
- e. Penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- f. Pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Inklusi;
- g. Penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- h. Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan Inklusi;
- i. Penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- j. Pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- k. Pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- l. Pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional –Sekolah Dasar dan pelaksana akreditasi lainnya;
- m. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Sekolah Dasar dan pendidikan inklusi;
- n. Pengusulan penetapan, pendirian dan penutupan lembaga pendidikan Sekolah Dasar;
- o. Pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;

- p. Pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar;
- q. Pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Dasar dan Pendidikan Inklusi;
- r. Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan sekolah Dasar, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Dasar;
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:

- 1. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Peserta didik dan Pembiayaan Sekolah Dasar
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Dasar
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Dengan Fungsi yang terperinci sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan kurikulum Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusi;
 - g. Penyusun kurikulum muatan lokal pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;

- h. Penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan Inklusi;
- i. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- j. Pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- k. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi.
- l. Pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional –Sekolah Menengah Pertama, dan pelaksana akreditasi lainnya;
- m. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- n. Pengusulan penetapan, pendirian dan penutupan lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- o. Pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional Sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- p. Pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- q. Pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi
- r. Pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- s. Pemfasilitasian kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan perguruan tinggi;
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi:

- a. Seksi Kurikulum Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan, peserta didik dan Pembiayaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- c. Seksi Sarana dan Prasarana Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun fungsi Bidang Guru dan tenaga kependidikan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pendataan dan analisis keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. Penetapan bahan kebijakan teknis pembinaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Pelaksanaan pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- d. Penyusunan dan melaksanakan program standarisasi kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan karier Guru dan Tenaga Kependidikan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang guru dan kependidikan membawahi:

- (1) Seksi Mutasi dan Promosi
- (2) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Karier
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Selain kelima bidang di atas tersebut ada unsur pelaksana Dinas yang dikenal dengan sebutan UPT (Unit Pelaksana Teknis).UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas masalah yang akan diselesaikan. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang akan sangat tergantung pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang cenderung kompleks. Dengan adanya struktur organisasi Dinas Pendidikan yang baru, ada beberapa kendala karena masih belum optimalnya setiap unit, pejabat, staf dalam memahami dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peran, tanggung jawab, kewenangan, dan tupoksinya.

C. ISU STRATEGIS

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi layanan pendidikan yang ada saat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya. Disamping itu, mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Sampang, Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Kemendikbud, mengingat bahwa sebagian dari rencana strategis kabupaten akan bersinergi dalam implementasinya.

Adapun strategi yang digunakan Untuk mencapai tujuan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan daya tampung sekolah negeri, swasta potensial termasuk yang berada dalam lingkungan pesantren
- 2) Penyediaan subsidi pembiayaan untuk pembelajaran paket A, B dan C yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat termasuk PKBM di lingkungan pesantren

- 3) Pengaturan rekrutmen bagi guru non PNS sehingga sesuai dengan kebutuhan dan mengedepankan mutu
- 4) Distribusi PNS untuk pemerataan sesuai kebutuhan dan kompetensi dan mengurangi *miss-match*
- 5) Penempatan guru kompeten untuk kelas awal SD/MI
- 6) Meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan
- 7) Stimulan kepada guru tidak tetap berupa honor dan insentif
- 8) Pemberian beasiswa prestasi kepada siswa berprestasi jenjang SD dan SMP
- 9) Pemberian BOP dan BOS
- 10) Pemenuhan sarana praktik keahlian sekolah kejuruan yang berorientasi pasar kerja sekaligus sebagai sarana pelatihan masyarakat
- 11) Pembinaan kualitas sekolah pada jenjang Pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sedangkan upaya membangun kepercayaan publik, harus dikembangkan mekanisme yang membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan melalui penyediaan informasi yang berkualitas berkaitan dengan akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pelaksanaan amanah stakeholders. Beberapa fokus yang dilaksanakan adalah:

- 1) Keterbukaan informasi melalui pengembangan WEB Dinas Pendidikan yang mengakomodir informasi pembangunan dan keluhan dan penanganan masalah berbasis sekolah termasuk *School Report Card*
- 2) Pengembangan kesepakatan akuntabilitas kinerja antara Kepala Dinas dan Kepala Bidang terkait target capaian yang disepakati
- 3) Mekanisme perencanaan dan monitoring pembangunan khusus untuk sektor pendidikan yang mengakomodir kebutuhan sekolah dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS/RKTS).

KEBIJAKAN

Kebijakan yang dibangun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang, bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan regulasi untuk menjamin pelaksanaan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau
- b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar
- c) Menjamin akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin.

Kebijakan–kebijakan tersebut di atas dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Penyediaan dana pendidikan dari APBD untuk peserta didik dari keluarga miskin atau yang berkekurangan, termasuk biaya personal
- 2) Memperluas akses pada sekolah menengah melalui prioritas pembiayaan dalam pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru
- 3) Penguatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- 4) Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui jalur pendidikan non formal
- 5) Perluasan layanan pendidikan non formal dan informal
- 6) Melaksanakan penjaminan mutu penerimaan siswa baru (PSB) SD/MI. Kriteria PSB SD/MI diprioritaskan untuk anak usia tujuh tahun atau kurang dari tujuh tahun dengan telah melalui pendidikan PAUD. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan ketidaksiapan anak dan AMK pendidikan dasar
- 7) Merumuskan regulasi rekrutmen guru non PNS yang berorientasi pada mutu. Dinas pendidikan melakukan tes penjaminan mutu dan guru diangkat melalui SK Kepala Sekolah masing-masing
- 8) Pengaturan distribusi guru PNS sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi dengan reward bagi guru di kawasan utara dan terpencil.
- 9) Koordinasi pengawasan antara pengawas pendidikan umum dan PPAI dalam integrasi akidah akhlaq dalam proses pembelajaran

- 10) Sinergi antara pendidikan di sekolah umum dan pendidikan agama dan keagamaan yang dikelola di bawah Departemen Agama.
- 11) Penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan
- 12) Mendorong otonomi satuan pendidikan melalui penerapan dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah
- 13) Penerapan ICT untuk merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel, mempermudah akses masyarakat pada informasi pendidikan
- 14) Efektivitas koordinasi antara Kantor Kemenag Kabupaten dengan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan
- 15) Kesepakatan akuntabilitas kinerja antara Bupati dengan Kepala Dinas Pendidikan, serta Kepala Dinas dengan Kepala Bidang.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Tujuan RPJMD : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator : Indeks Pendidikan

Tujuan Renstra : Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator : 1. Harapan Lama Sekolah
2. Rat-rata Lama Sekolah

Sasaran Renstra : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

Indikator : 1. APK PAUD
2. Angka Melek Huruf
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B
6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

7. Rata-rata Nilai USBN

8. Rata-rata Nilai UN

Program:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal,

Indikator:

1.1 Rasio Siswa PAUD per rombel

1.2 Persentase Peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf

1.3 Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian

2. Program Pembinaan Sekolah Dasar,

Indikator:

2.1 Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A

2.2 Rasio Siswa SD/MI per rombel

2.3 Sekolah SD kondisi bangunan baik

2.4 Angka kelulusan (AL) SD/MI

2.5 Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

2.6 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

3. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Indikator:

3.1 Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B

3.2 Rasio Siswa SMP/MTs per rombel

3.3 Sekolah SMP kondisi bangunan baik

3.4 Angka kelulusan (AL) SMP/MTs

3.5 Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK

3.6 Persentase SMP/MTS berakreditasi minimal B

4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Indikator:

4.1 Rasio guru terhadap murid SD/MI

4.2 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs

4.3 Prosentase guru yang memenuhi standar kualifikasi

Kegiatan:

1. Pembinaan dan Fasililitasi Penyelenggaraan PAUD & PNFI,

Indikator:

- a. Penyaluran Dana BOP PAUD dan Kesetaraan
 - b. Penyelenggaran Paket A, B dan C
 - c. Peningkatan hasil UNBK Paket A,B dan C
 - d. Pembinaan Kelembagaan PAUD dan PNFI /Akreditasi
2. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaran Pendidikan Sekolah Dasar,

Indikator:

- a. Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Peningkatan Prestasi Siswa
 - c. Penyaluran Dana BOS dan PIP
 - d. Peningkatan Pelayanan Kelembagaan
 - e. Peningkatan hasil USBN
3. Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaran Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

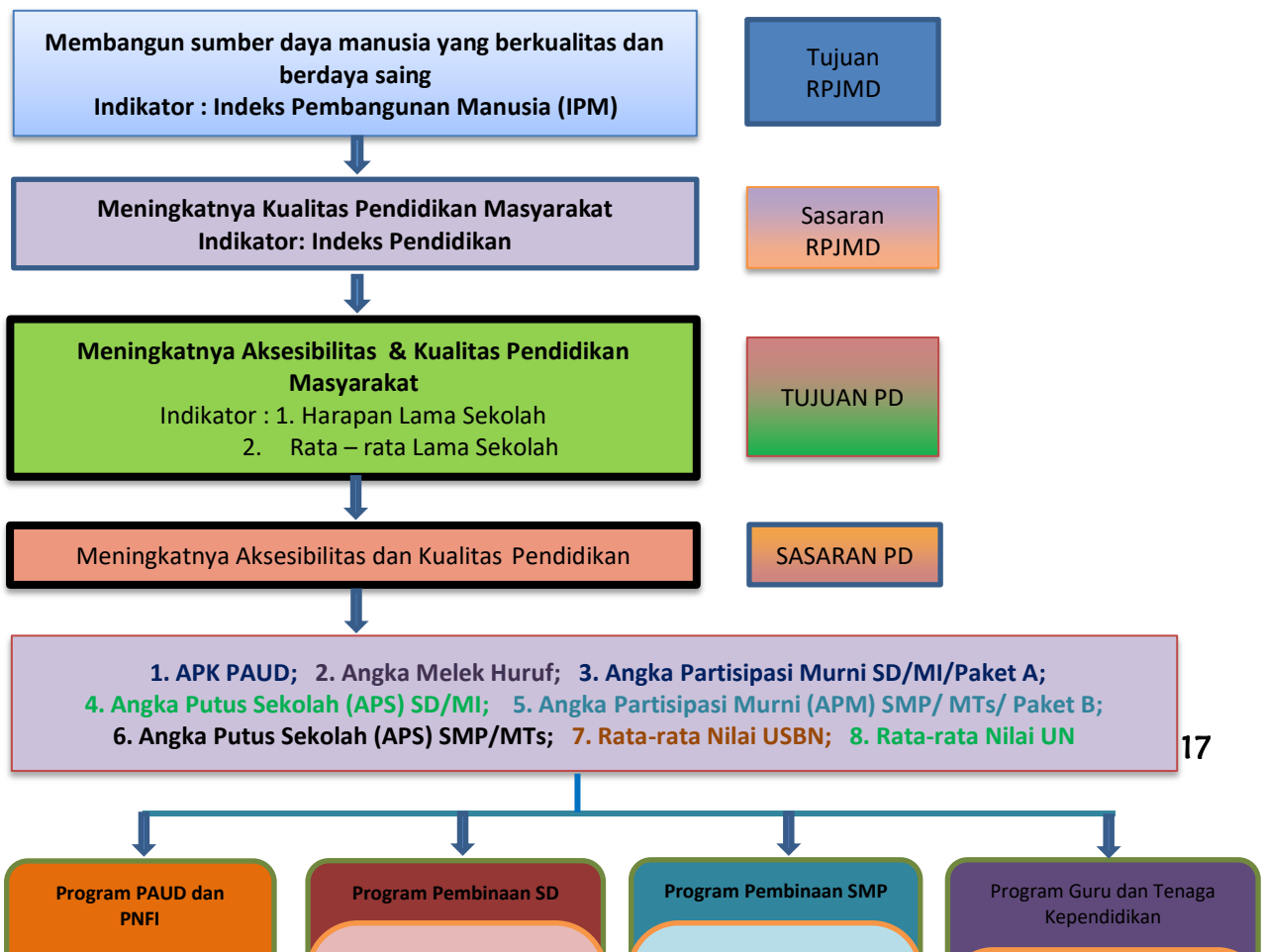
Indikator:

- a. Pelaksanaan Kurikulum
 - b. Peningkatan Prestasi Siswa
 - c. Penyaluran Dana BOS dan PIP
 - d. Peningkatan Pelayanan Kelembagaan
 - e. Peningkatan hasil UN
4. Fasilitasi Pembinaan Guru dan tenaga Kependidikan;

Indikator:

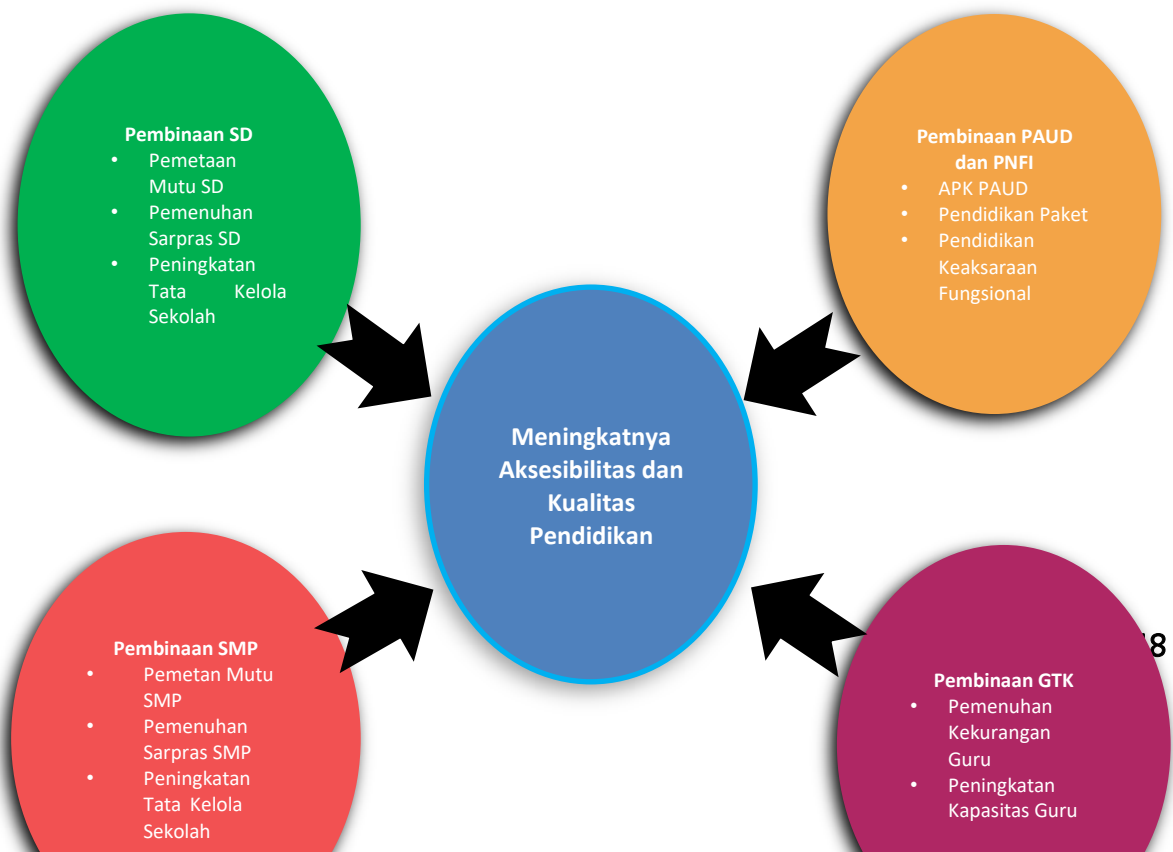
- a. Penyiapan Cakep dan Cawas
- b. Penetapan Angka Kredit dan KP
- c. Pengusulan Promosi dan mutasi
- d. Penyaluran Insentif GTT dan TGP
- e. Peningkatan Kapasitas Guru
- f. Monev Kinerja GTK
- g. GTK berprestasi

Bagan Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

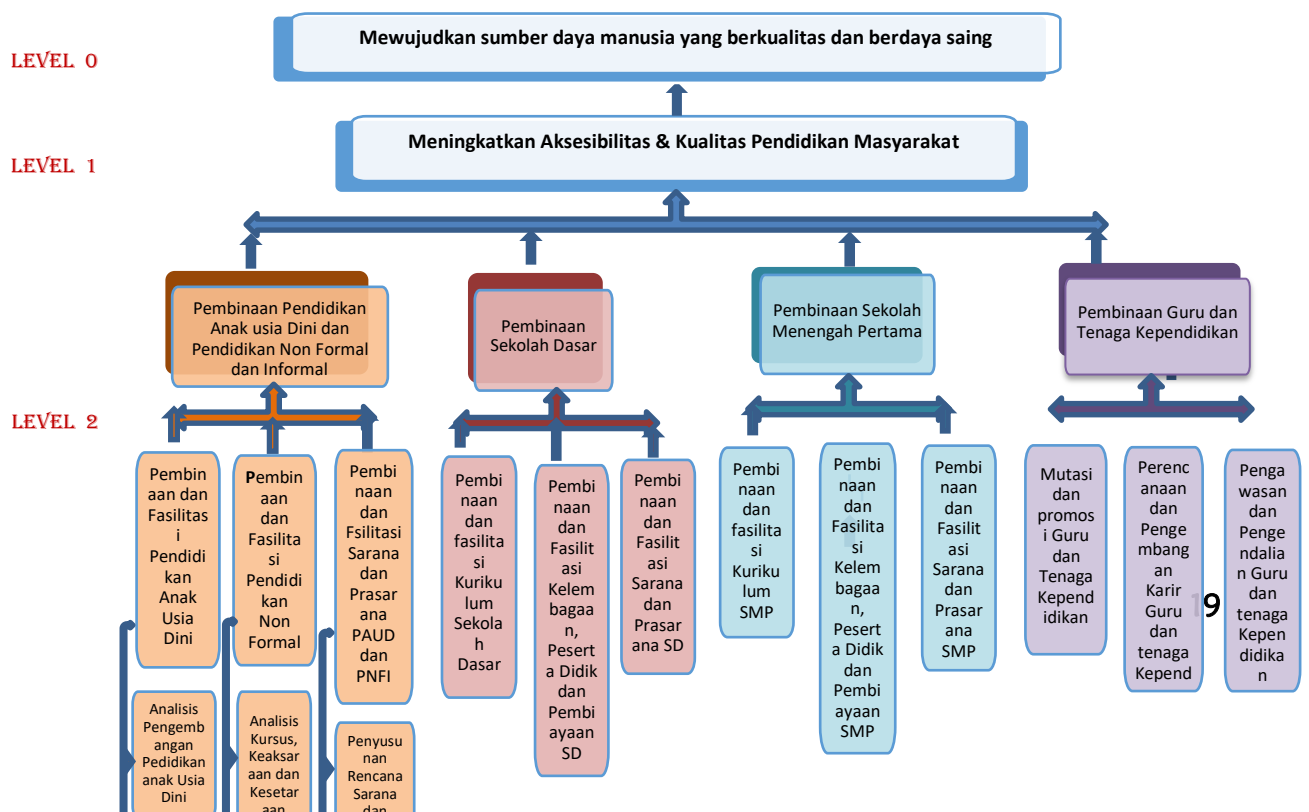


1. Rasio siswa PAUD per rombel
2. Persentase pendidikan keaksaraan melek huruf
3. Persentase peserta kesetaraan lulus ujian

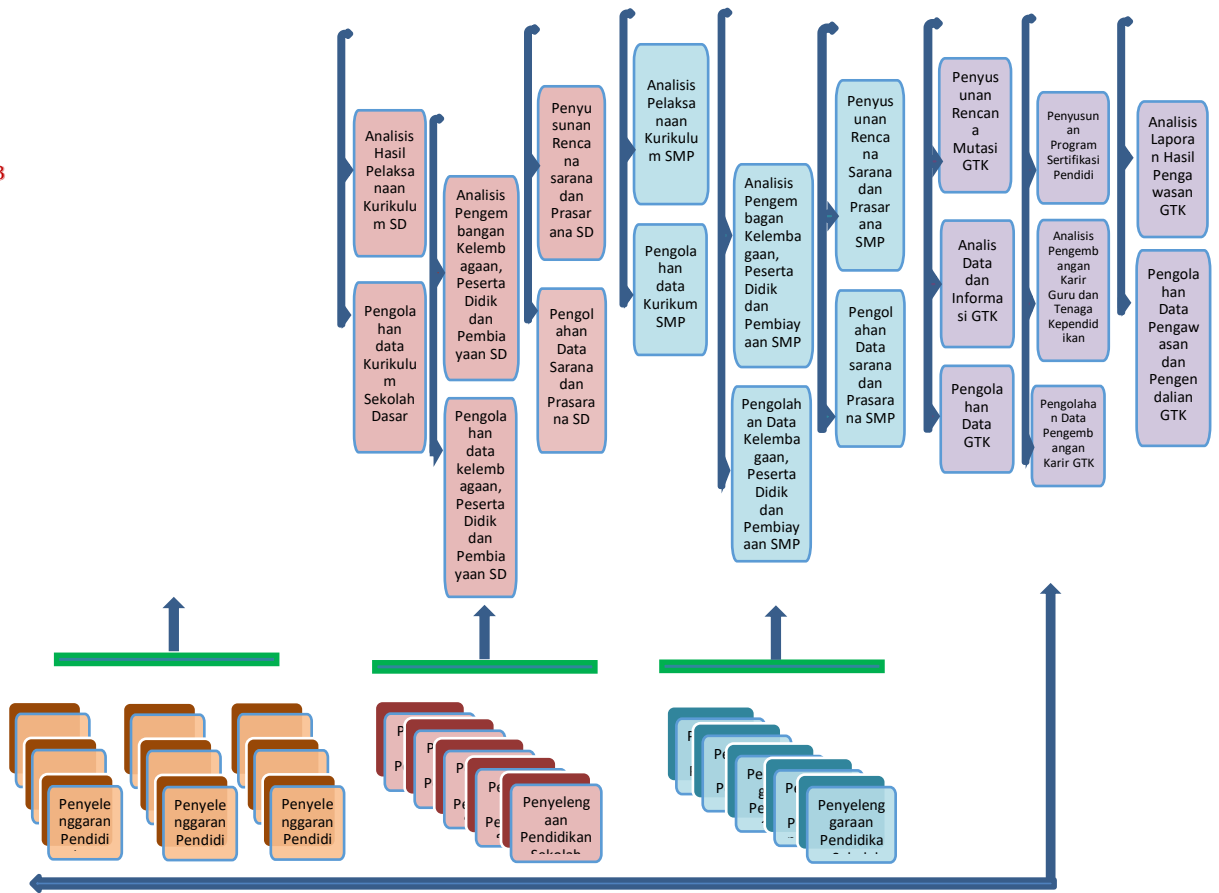
E. Peta Proses Bisnis



Inti proses bisnis dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:



LEVEL 3



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan Misi pembangunan Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan Pendidikan yang merupakan penjabaran makna dari misi. Sektor pendidikan berkait pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi

ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas pendidikan Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
KINERJA RPJMD										
Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
Tujuan: Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing										
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Indeks Pendidikan	N	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59
KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH										
Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		1 Harapan Lama Sekolah (HLS)		11,76	12,11	12,46	12,84	13,23	13,63	14,02
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		4,35	4,58	4,82	5,07	5,33	5,6	5,88
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	1. APK PAUD	%	85,43	87,5	90,58	93,67	95,9	98,1	101
	2	Angka Melek Huruf	%	92,75	93	93,5	94	94,5	95	95,5
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	97,9	98,3	98,7	99,1	99,6	100
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/	%	74,76	75,76	76,78	77,74	78,65	79,55	80,5

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (2018)	TARGET					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Paket B								
		6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,25	0,24	0,23	0,22	0,21	0,2
		7 Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	65,15	68,45	71,25	73,75	74,15	75
		8 Rata-rata Nilai UN	N	40,67	41,7	42,68	43,72	44,68	45,7	46,72

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran pada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2019 Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2019
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	APK PAUD	87,5
2			Angka Melek Huruf	93

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
3	Masyarakat		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,9
4			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,13
5			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	75,76
6			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,25
7			Rata-rata Nilai USBN	65,15
8			Rata-rata Nilai UN	41,7

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas	APK PAUD	90,58%
2			Angka Melek Huruf	93,50%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
3	Pendidikan Masyarakat	Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,30%
4			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%
5			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	76,78%
6			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,24%
7			Rata-rata Nilai USBN	68,45
8			Rata-rata Nilai UN	44,68

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2019, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja Progres Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Sama atau Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 74 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 74 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran/tujuan dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2014 - 2019 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tahun 2019 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2019 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja 2019
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Sasaran Renstra		Satuan	2018	2019			
Uraian	Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	APK PAUD	%	85,43	87,5	87,76	100,30
	2	Angka Melek Huruf	%	92,75	93	92,75	99,73
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	%	97,4	97,9	96,65	98,72

Sasaran Renstra		Satuan	2018	2019			
Uraian	Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	%	
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,13	0,12	108,33
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	%	74,76	75,76	83,55	110,28
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,25	0,02	1250
	7	Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	65,15	71,33	109,49
	8	Rata-rata Nilai UN	N	41,27	41,70	46,54	111,61

Sasaran yang dicapai pada tahun 2019 dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Capaian melebihi target, (2) Capaian mencapai target dan (3) Capaian yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.5
Klasifikasi Kriteria Keberhasilan

No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Klasifikasi Kriteria			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1.	Sasaran 1	100,30 %			
2.	Sasaran 2		99,73 %		
3.	Sasaran 3		98,72 %		
4.	Sasaran 4	108,33 %			
5.	Sasaran 5	110,28 %			
6.	Sasaran 6	1250 %			
7.	Sasaran 7	109,49 %			
8.	Sasaran 8	111,61 %			

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja pada tujuan terhadap Masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD diperoleh dari jumlah semua siswa yang bersekolah pada jenjang PAUD/TK/RA sebanyak 33.671 siswa di bagi jumlah anak yang berusia 4 - 6 tahun sebanyak 38.367 siswa. Realisasi APK PAUD pada tahun 2019 sebesar 87,76%, angka ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 87,50 %.
- b. Angka Melek Huruf (AMH) diperoleh dari Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas yang dapat baca tulis pada tahun 2019 sebanyak 569.398 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 613.878, sehingga Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebesar 92,75%. Capaian kinerja angka melek huruf pada tahun 2019 masih berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 93 %
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2019, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebanyak 106.923 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun sebesar 110.632 siswa. Dengan demikian capaian APM SD/MI/Paket A sebesar 96,65 % sedikit dibawah target sebesar 100 %. Keadaan ini disebabkan karena masih ada siswa yang masuk sekolah lebih awal atau melebihi dari usia yang seharusnya masuk jenjang SD/MI (7 – 12 Tahun).
- d. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, diperoleh dari Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebanyak 140 dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun 2019 sebanyak 116.251 siswa. angka putus sekolah pada tahun 2019 sebesar 0,12 % telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,13 %.

- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sejumlah 43.294 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun sebanyak 51.816 siswa. Dengan demikian capaian APM SMP/MTs/Paket B sebesar 83,55 % sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 75,76%.
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, diperoleh dari Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 sebanyak 12 dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 sebanyak 52.965 siswa. angka putus sekolah pada tahun 2019 sebesar 0,02% telah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,25%
- g. Realisasi Rata-rata Nilai USBN pada tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan sebesar 71,33 dari target 65,15, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 109,49%
- h. Rata-rata Nilai UN pada tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan sebesar 46,54 dari target 41,70, sehingga capaian indikator kinerja sebesar 111,61 %

B. Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2019, akuntabilitas keuangan diukur melalui kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2019. Anggaran Urusan Wajib Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 565.309.193.771,36,- dengan realisasi sebesar Rp 524.172.881.061,50,- (92,72%). Dengan rincian anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 415.172.531.534,00,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 150.136.662.237,36,- Sedangkan untuk realisasi anggaran pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 388.206.111.434,00,- (95,50%) dan

realisasi belanja langsung sebesar Rp. 135.966.769.627,50,- (90,56%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan.

Rincian program kegiatan pada tahun 2019 dapat disajikan pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.5
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI DAN TUNJANGAN)							
1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan)	415.172.531.534	388.206.111.434	93,50%	Gaji dan Tunjangan	12 bulan	12 bulan	100
	BELANJA LANGSUNG							
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	2.477.339.000	2.203.559.239		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100
1	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	1.677.380.000	1.472.800.189	87,80%	Jumlah surat terkirim	3500 surat	3500 surat	100
					Rekening listrik, telepon dan air yang terbayar	12 bulan	12 bulan	100
					Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas operasional kendaraan selama 1 tahun	380 unit	380 unit	100
					Jasa kebersihan kantor yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	100
					Tenaga teknis dan tenaga keamanan yang terlaksana	12 bulan	12 bulan	100
2	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	542.874.000	503.482.050	92,74%	Jumlah kebutuhan ATK selama setahun	12 bulan	12 bulan	100
					Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
					jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	100
					kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100
					Jumlah bahan bacaan dan buku perundang-undangan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100
					jumlah makan dan minum selama setahun	12 bulan	12 bulan	100
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	257.085.000	227.277.000	88,41%	Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	1100 OK	1100 OK	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
					Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah yang terlaksana	1344 OK	1211 OK	90,10
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.125.396.000	1.029.658.070		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	100%	100
4	Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	500.000.000	482.324.975	96,46%	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang terlaksana	15 lembaga	15 lembaga	100
					Jumlah perlengkapan kantor terpelihara dengan baik	15 lembaga	15 lembaga	100
5	Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	154.000.000	100.577.220	65,31%	jumlah pemeliharaan Kendaraan dinas yang terlaksana	5 unit	5 unit	100
6	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	471.396.000	446.755.875	94,77%	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap	15 lembaga	15 lembaga	100
					Jumlah Komputer, laptop dan printer	21 unit	21 unit	100
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.150.000	-		Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur	100%	0	0
7	Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/ Seminar	40.150.000	-	0,00%	pengiriman pendidikan dan pelatihan formal yang terlaksana	12 orang	0	0
	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	215.661.250	173.286.145		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100
8	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	122.240.000	101.954.680	83,41%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10 buku	10 buku	100
					Jumlah Dokumen laporan keuangan semester	30 buku	30 buku	100
					Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	30 buku	30 buku	100
					Jumlah Dokumen daftar gaji	12 bulan	12 bulan	100
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	30.071.250	29.284.445	97,38%	Jumlah dokumen RKA-DPA SKPD	2 dokumen	2 dokumen	100
					Jumlah dokumen Renja SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
					Jumlah dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100
10	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	63.350.000	42.047.020	66,37%	Jumlah Program/kegiatan unggulan yang ditampilkan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal	10.422.368.000	10.164.674.675		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia dini	32,20	34,53	93,25
					Persentase Peserta pendidikan keaksaraan yang melek huruf	80,75%	92,75%	114,86%
					Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang	90,85%	90,85%	100,00

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
					lulus ujian			
11	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;	296.181.000	230.143.625	77,70%	Jumlah PAUD yang Mandapatkan Bantuan BOP	700 lembaga	689 lembaga	98,43
					Jumlah peserta Pelatihan Kurikulum K 13 bagi pendidik PAUD	150 orang	150 orang	100
12	Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini	143.124.500	119.139.450	83,24%	Jumlah Peserta Pelatihan kompetensi bagi pendidik PAUD	200 orang	200 orang	100
					Jumlah Ijin Operasional Baru dan Ijin Perpanjangan PAUD	100 lembaga	0	0
13	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	6.674.482.500	6.617.120.000	99,14%	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	32 lembaga	32 lembaga	100
					Lomba Hari Anak Nasional dan Hari Aksara Internasional/ Nasional	2 kegiatan	2 kegiatan	100
					Kelompok yang melaksanakan pendidikan keaksaraan	256 pokjar	256 pokjar	100
					Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
14	Penyelenggaraan Pendidikan Informal PAUD dan PNFI	400.000.000	391.985.200	98,00%	Jumlah peserta Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan dan Pendidikan Keluarga	1400 orang	1400 orang	100
					Jumlah peserta Bimtek Bagi Tutor dan Penyelenggara PAUD	96 orang	96 orang	100
					Jumlah Izin Operasional Pendidikan Kursus dan Kelembagaan	10 lembaga	10 lembaga	100
					Jumlah PAUD /PNFI yang terakreditasi	180 lembaga	180 lembaga	100
15	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar PAUD dan PNFI	2.820.885.000	2.718.605.800	96,37%	Jumlah gedung sekolah bertambah	8 unit	8 unit	100
					Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	6 ruang kelas	6 ruang kelas	100
					Jumlah pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	4 paket	4 paket	100
					Jumlah bangunan sekolah yang direhab	2 unit	2 unit	100
					Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	3 unit	3 unit	100
16	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang PAUD dan PNFI	87.695.000	87.680.600	99,98%	Jumlah meubeler bertambah	6 lembaga	6 lembaga	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
	Program Pembinaan Sekolah Dasar	85.213.512.138	80.404.213.384		Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	108,50%	105,08%	96,848
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI	102,8	101,22	98,463
					Sekolah SD kondisi bangunan baik	79,50%	77,92%	98,013
					Angka kelulusan (AL) SD/MI	99,54%	99,66%	100,12
					Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,74%	90,56%	93,61
17	Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar	1.036.980.000	968.841.786	93,43%	Jumlah peserta Pelatihan Guru Kelas Kurikulum 2013	200 guru	184 guru	92,00
					Jumlah peserta Pelatihan CTL/Literasi	50 guru	46 guru	92,00
					Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Muatan Lokal /Pramuka	50 guru	46 guru	92,00
					Jumlah peserta Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran	50 guru	46 guru	92,00
					Jumlah peserta Pelatihan Inovasi Pembelajaran	180 guru	180 guru	100
					Jumlah peserta Pelatihan Peningkatan Mutu Pembelajaran bagi Guru Al-Qur'an	36 guru	36 guru	100
					Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	105 guru	97 guru	92,38
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi KBM	56 lembaga	56 lembaga	100
18	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	769.270.000	633.448.794	82,34%	Jumlah peserta USBN	13000 siswa	12114 siswa	93,18
					Jumlah Peserta Try Out	13000 siswa	12114 siswa	93,18
19	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah dasar	383.668.000	364.963.802	95,12%	Jumlah Siswa SD berprestasi yang terjaring di Tingkat Provinsi	168 siswa	168 siswa	100
					Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	685 lembaga	685 lembaga	100
					Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreativitas siswa	200 orang	200 orang	100
					Persentase SD yang Ber UKS	80%	80%	100
					Persentase Pemenang Lomba OSN, FLS2N dan O2SN di tingkat Provinsi	20%	20%	100
20	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Dasar	58.601.539.137,76	54.368.454.361,50	92,78%	Jumlah Dana BOS yang di berikan untuk SD dan Madin	617 sekolah	617 sekolah	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
					Jumlah Monev yang dilakukan ke sekolah Penerima BOS	120 lembaga	120 lembaga	100
21	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar SD	22.364.107.500	22.020.119.980	98,46%	Jumlah ruang kelas sekolah bertambah	30 RK	30 RK	100
					Jumlah taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir bertambah	4 Paket	4 Paket	100
					Jumlah bangunan toilet bertambah	8 ruang	8 ruang	100
					Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	2 unit	2 unit	100
					Jumlah ruang kelas yang direhab	199 RK	199 RK	100
					Jumlah ruang perpustakaan yang direhab	2 ruang	2 ruang	100
					Jumlah toilet sekolah yang direhab	28 unit	28 unit	100
22	Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD	2.057.947.500	2.048.384.660	99,54%	Jumlah meubelair ruang kelas sekolah	7 paket	7 paket	100
					Jumlah buku koleksi perpustakaan	39 paket	39 paket	100
	Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	39.638.292.850	31.813.669.867		Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B	102,20%	102,22%	100,20
					Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTs	114,60	102,61	89,538
					Sekolah SMP kondisi bangunan baik	87,72%	90,23%	102,86
					Angka kelulusan (AL) SMP/MTs	97,60%	99,65%	102,10
					Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK	77,90%	81,74%	104,93
23	Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)	195.522.600	176.404.856	90,22%	Jumlah peserta pelatihan dan pengembangan kurikulum SMP	300 guru	300 guru	100
					Jumlah peserta Pembinaan MGMP	50 orang	0	0
					Jumlah peserta Pelatihan pengembangan contextual teaching and learning (CTL)	100 guru	0	0
					Jumlah peserta pelatihan pengembangan pembelajaran berbasis TIK	50 guru	50 guru	100
					Jumlah kegiatan monev	100 lembaga	100 lembaga	100
24	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional	318.990.000	275.444.077	86,35%	Jumlah peserta UAN	7000 siswa	7000 siswa	100
					Jumlah Monev yang dilaksanakan	100 lembaga	100 lembaga	100
25	Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.088.347.000	650.280.400	59,75%	Jumlah Siswa SMP berprestasi yang terjaring di Tingkat	9 orang	9 orang	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
					Provinsi			
					Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	250 lembaga	250 lembaga	100
					Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	200 lembaga	200 lembaga	100
					Persentase SMP yang Ber UKS	100%	100%	100
					Persentase Pemenang Lomba OSN,FLS2N, Gala Siswa dan O2SN SMP di tingkat Provinsi	35%	35%	100
					Jumlah Peserta yang ikut P4GN	200 peserta	200 peserta	100
					Jumlah peserta yang ikut Pekan Seni Pelajar	200 lembaga	200 lembaga	100
					Jumlah peserta yang ikut Gala Siswa	250 peserta	185 peserta	74,00
26	Peningkatan Pembiayaan Sekolah Menengah Pertama	15.736.218.299,60	14.944.221.207,00	94,97%	Jumlah Penerima Bantuan Operasional sekolah	267 lembaga	267 lembaga	100
					Jumlah sekolah yang mendapatkan Program PIP	267 lembaga	267 lembaga	100
27	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dasar Sekolah Menengah Pertama	17.783.720.950	11.397.676.144	64,09%	Jumlah Ruang kelas baru bertambah	9 RK	9 RK	100
					Jumlah Ruang Lab. IPA bertambah	2 Ruang	2 Ruang	100
					Jumlah perpustakaan sekolah bertambah	2 unit	2 unit	100
					Jumlah ruang kelas sekolah yang direhab	56 RK	56 RK	100
					Jumlah bangunan taman, lapangan upacara dan parkir bertambah	7 Paket	7 Paket	100
					Jumlah ruang guru yang direhab	2 Paket	2 Paket	100
					Jumlah Jamban guru/siswa bertambah	17 Unit	17 Unit	100
					Jumlah bangunan rumah dinas guru bertambah	2 Paket	2 Paket	100
28	Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Sekolah Menengah Pertama	4.515.494.000	4.369.643.183	96,77%	Jumlah meubeler RKB bertambah	7 paket	7 paket	100
					Jumlah peralatan LAB Komputer bertambah	14 paket	14 paket	100
					Jumlah alat praktek dan peraga siswa	1 paket	1 paket	100
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	10.665.352.000	9.886.811.283		Rasio guru terhadap murid SD/MI	13,3 rasio	12	90,23
					Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	13,2 rasio	12	90,91
					Prosentase guru yang memenuhi standar kualifikasi	89,86	77,85	86,635
29	Peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	924.007.500	591.575.168	64,02%	Jumlah calon Kepala sekolah yang memenuhi Standar	70 orang	70 orang	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran			
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Target	Realisasi	%
					Jumlah Calon Pengawas yang memenuhi standar	60 orang	60 orang	100
					Jumlah Guru, Pengawas, Pamong Belajar dan penilik yang memenuhi angka kredit	900 orang	900 orang	100
30	Perencanaan dan Pengembangan Karier Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)	8.708.035.250	8.660.830.000	99,46%	Jumlah Guru yang mengikuti Workshop Literasi	40 guru	40 guru	100
					Terbayarnya HR GTT	2000 GTT	2000 GTT	100
					Jumlah Guru yang bersertifikasi	145 Guru	145 Guru	100
31	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	1.033.309.250	634.406.115	61,40%	Jumlah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas yang Berprestasi	42 orang	42 orang	100
					Monev kinerja Guru, Pengawas sekolah	600 orang	600 orang	100
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	338.591.000	290.896.965		Persentase informasi/data base pendidikan yang terupdate	97,20%	97,20%	100
32	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	185.591.000	155.533.060	83,80%	Data Pokok Pendidikan yang tersusun	100%	100%	100
					Evaluasi kinerja bidang pendidikan	100%	100%	100
					Jumlah Rapat koordinasi Pendidikan yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100
33	Peningkatan Wawasan Kebangsaan Bidang Pendidikan	153.000.000	135.363.905	88,47%	Peringatan hari besar pendidikan	3 kegiatan	3 kegiatan	100
TOTAL BELANJA LANGSUNG (BL)		149.798.071.237,36	135.675.872.662,50	90,57%				
TOTAL BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG		564.970.602.771,36	523.881.984.096,50	92,73%				

Secara umum realisasi serapan anggaran pada program urusan wajib pendidikan pada tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran Pada kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah untuk rakor dan konsultasi diluar daerah terealisasi sebesar 90,10%, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dalam pelaksanaannya).
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pada Pelaksanaan BinteK/Sosialisasi/Seminar tidak terealisasi karena pada tahun 2019 tidak ada kegiatan binteK/sosialisasi yang harus dilaksanakan sehingga disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dalam pelaksanaannya).

- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal Pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk kinerja Jumlah PAUD yang mendapatkan Bantuan BOP terealisasi sebesar 98,43%, hal ini disebabkan ada sebagian lembaga yang tidak sinkron dapodik dan tidak sesuai dengan persyaratan penerima bantuan BOP PAUD (efisiensi dalam pelaksanaannya).
- d. Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik Anak Usia Dini untuk Jumlah Ijin Operasional Baru dan Ijin Perpanjangan PAUD tidak terealisasi karena dilakukan PAK.
- e. Program Pembinaan Sekolah Dasar Pada Kegiatan Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar untuk Pelatihan Guru Kelas Kurikulum 2013 terealisasi sebesar 92 %, Pelatihan CTL/Literasi terealisasi sebesar 92 %, Pelatihan Peningkatan Muatan Lokal /Pramuka terealisasi sebesar 92 %, Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran terealisasi sebesar 92 % dan guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif terealisasi sebesar 92,38%, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dalam pelaksanaannya).
- f. Program Pembinaan Sekolah Dasar Pada Kegiatan Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Nasional untuk indikator pelaksanaan USBN dan Try Out terealisasi sebesar 93,18%, hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan peserta yang ikut ujian dan try out atau disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dalam pelaksanaannya).
- g. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada Kegiatan Pengembangan Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada indikator pelaksanaan pembinaan MGMP dan Pelatihan pengembangan contextual teaching and learning (CTL) tidak terealisasi, hal ini disebabkan karena kegiatan tersebut di PAK.
- h. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama pada indikator pelaksanaan gala siswa terealisasi sebesar 74 %, hal ini

disebabkan karena peserta yang ikut dalam gala siswa lebih sedikit dari peserta yang direncanakan atau disesuaikan dengan kebutuhan (efisiensi dalam pelaksanaannya).

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama satu periode yang dijadikan sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2019. Sehingga laporan ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pendidikan di masa yang akan datang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Sangat Baik** karena nilai capaiannya rata-rata 248,56 % dari 8 sasaran indikator.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 1 : Tingkat capaian APK PAUD pada tahun 2019 sebesar 100,30 % dengan realisasi sebesar 87,76 % dikategorikan **Sangat Baik**

Indikator Sasaran 2 : Tingkat capaian Angka Melek Huruf pada tahun 2019 sebesar 99,73 % dengan realisasi sebesar 92,75 % dikategorikan **Baik**

Indikator Sasaran 3 : Tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A pada tahun 2019 sebesar 98,72 %,

	dengan realisasi sebesar 96,65 % dikategorikan Baik
Indikator Sasaran 4 :	Tingkat capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2019 sebesar 108,33 % dengan realisasi sebesar 0,12 % dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 5 :	Tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B pada tahun 2019 sebesar 110,28% dengan realisasi sebesar 83,55 % dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 6 :	Tingkat capaian Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2019 sebesar 1250 % dengan realisasi nilai rata-rata ujian sebesar 0,02 % dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 7 :	Tingkat capaian Rata-rata Nilai USBN pada tahun 2019 sebesar 109,49 % dengan realisasi nilai rata-rata ujian sebesar 71,33 dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 8	Tingkat capaian Rata-rata Nilai UN pada tahun 2019 sebesar 111,61 % dengan realisasi nilai rata-rata ujian sebesar 46,54 dikategorikan Sangat Baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2019, di samping mengacu pada tujuan, sasaran dan kebijakan, juga mengacu pada program kegiatan dengan memperhitungkan rincian akuntabilitas kinerja, yang meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi kerja aparatur, dan evaluasi keuangan.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas ini secara teknis dapat dijadikan dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja fungsi organisasi secara menyeluruh di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis yang telah disusun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi kearah perkembangan dan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Sampang, Februari 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG

Drs. H. NOR ALAM, M.Si
NIP. 19681231 198703 1 008